

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan faktor penting dalam pembentukan pribadi manusia. Pendidikan sangat berperan dalam menentukan baik buruknya pribadi manusia menurut ukuran normatif. Menyadari hal tersebut, pemerintah sangat serius menangani dalam bidang pendidikan, sebab dengan sistem yang baik diharapkan muncul generasi bangsa yang berkualitas dan mampu menyesuaikan diri untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pendidikan sebagai investasi yang menghasilkan manusia-manusia yang memiliki pengetahuan, sikap dan keterampilan yang dibutuhkan dalam membangun suatu bangsa. Manfaat (*benefit*) individu, sosial atau institusional akan diperoleh dalam waktu seketika atau diperoleh secara cepat (*quick yielding*), tetapi perlu waktu yang cukup lama bahkan bisa satu generasi.

Pendidikan tidak hanya mempersiapkan individu dalam pembentukan kepribadian, tetapi pendidikan menyediakan berbagai macam tenaga kerja yang sangat penting untuk mendukung pembangunan industri dan pertumbuhan ekonomi. Pendidikan membutuhkan pengeluaran yang tidak sedikit dari keuangan agar mampu memberikan kontribusinya berupa pertumbuhan ekonomi masyarakat dan pembangunan bangsa, sedangkan bagi individu akan meningkatkan kemampuan ekonomis dan kecerdasan individu. Biaya (*cost*) diartikan sebagai suatu jumlah uang yang disediakan (dialokasikan) dan digunakan atau dibelanjakan

untuk terlaksananya fungsi-fungsi atau kegiatan pencapaian tujuan dan sasaran-sasaran dalam rangka proses manajemen sekolah (Mintarsih, 2004: 15).

Pendidikan sebagai salah satu investasi kedepan harus dianggap secara serius kita terkadang memandang pendidikan hanya menjadi masalah individual lembaga pendidikan hanya menjadi masalah individual lembaga pendidikan formal yang berada disebuah sistem pendidikan, baik itu pendidikan tingkat dasar maupun pendidikan tingkat perguruan tinggi. Tetapi dalam hal ini peran semua komponen baik itu pemerintah, orang tua, maupun masyarakat atau lembaga pendidikan itu sendiri bukan saja harus mampu merumuskan sebuah format manajemen pendidikan yang efektif dan efisien tetapi juga harus mampu memberikan iklim kondusif dalam menciptakan masyarakat belajar (Purwanto, 1998: 36).

Pendidikan dalam operasionalnya tidak dapat dilepaskan dari masalah biaya atau moneter. Biaya pendidikan yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan pendidikan tidak akan tampak hasilnya secara nyata dalam waktu yang relatif singkat. Oleh karena itu, uang yang dikeluarkan oleh pemerintah, masyarakat, maupun orang tua (keluarga) untuk menghasilkan pendidikan atau membeli pendidikan bagi anaknya harus dipandang sebagai investasi. Uang yang dikeluarkan di bidang pendidikan sebagai bentuk investasi pada periode tertentu, di masa yang akan datang harus menghasilkan keuntungan (benefit) atau manfaat, baik dalam bentuk uang (financial) maupun nonfinansial. Dalam bentuk uang diperoleh sebagai balas jasa atas produktivitas tenaga kerja dan dalam bentuk nonfinansial nilai-nilai, seperti meningkatkan kesehatan, keamanan atau keterlibatan masyarakat, baik dari aspek individu, sosial, maupun ekonomi (Nanang Fatah, 2009: 6-7).

Biaya pendidikan merupakan salah satu komponen masukan instrumental (instrumental output) yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Apabila melihat pada peradaban Islam, mulai masa Rasulullah SAW sampai abad pertengahan, pendanaan lembaga pendidikan ternyata telah mendapatkan perhatian yang besar dari para penyelenggara pendidikan maupun dari pihak-pihak yang tidak terlibat secara langsung didalamnya. Umat Islam pada waktu itu sudah memahami benar perlunya biaya besar untuk membangun dan mengelola sekolah yang bermutu (muhammad-kurdi.blogspot.com).

Menteri pendidikan, Bambang Soedibyo mengatakan:

“yang namanya pembiayaan pendidikan didasarkan pada tingkat mutu tertentu. Besaran anggaran pendidikan diasumsikan pada tingkat mutu tertentu pula secara nasional. Kemudian dihitung berapa anggaran yang bersumber dari APBN, APBD, atau masyarakat”.

Fattah mengemukakan: “adanya perbedaan dalam pembiayaan pendidikan tersebut dapat ditelusuri melalui perbedaan kebijakan negara dan sistem manajemen pendidikan terutama dalam penggunaan input-inpiti persekolahan. Pada pendidikan dasar dan menengah penentuan utama biaya pendidikan adalah gaji guru dan rasion guru, siswa”.

Penerapan dan sistem manajemen keuangan yang baku dalam lembaga pendidikan tidak dapat disingkat lagi. Permasalahan yang terjadi di dalam lembaga terkait dengan manajemen keuangan pendidikan diantaranya sumber daya yang terbatas, pembiayaan program yang serampangan, tidak mendukung visi, misi dan kebijakan sebagaimana tertulis dalam rencana strategis lembaga pendidikan. Di satu sisi lembaga pendidikan perlu dikelola dengan tata pamong yang baik (good gaverment), sehingga menjadikan pendidikan yang bersih dari berbagai malfungsi dan malpraktik pendidikan yang merugikan pendidikan (Suhardan, dkk. 2001: 255-256).

Guru merupakan titik sentral yang strategis dalam kegiatan pendidikan, guru merupakan tenaga pendidik yang khusus diangkat dengan tugas utama mengajar dan mendidik. Disamping itu, guru dibebani tugas sebagai pelaku pembaharuan. Mengingat tugas guru yang sangat strategis tersebut, masalah kelayakan mengajar menjadi persyaratan yang harus dipenuhi. Tidak dimilikinya kelayakan mengajar oleh guru-guru secara langsung mempengaruhi mutu pendidikan.

Peran guru di masa mendatang akan menjadi lebih kritis dan strategis, khususnya dengan diberlakukannya otonomi daerah. Penetapan kebijakan tersebut akan berimplikasi penting dimana guru akan menjadi aktor utama dalam berbagai kegiatan pendidikan. Guru dituntut untuk lebih mandiri dalam mengembangkan berbagai kegiatan termasuk untuk menyesuaikan kurikulum agar sesuai dengan potensi yang ada di daerah atau lokasi sekolah dimana mereka mengajar.

Sehubungan dengan hal tersebut, masalah kelayakan mengajar guru menjadi lebih signifikan untuk dipertanyakan. Menyoal kelayakan tersebut tampaknya mutlak dilakukan karena berhubungan langsung dengan mutu pendidikan yang dihasilkan. Implikasi nyata dalam hal tersebut adalah bahwa pemerintah maupun masyarakat perlu bekerjasama mengambil langkah-langkah nyata baik dari segi kemauan politik maupun kebijakan yang mengikat bagi peningkatan mutu guru-guru perlu dibenahi secara mendasar. Pembinaan dimaksud antara lain dengan pembaharuan program-program atau kurikulumnya yang diarahkan untuk memberikan pengetahuan, peluang untuk pendalaman, dan keterampilan dalam hal didaktik metode, materi pelajaran dan pengembangan kreativitas dalam rangka membina kehidupan atau proses pembelajaran yang baik di sekolah (Hendarman, 2012: 177-178).

Banyak masalah mutu yang dihadapi dalam dunia pendidik seperti mutu proses belajar mengajar dan mutu hasil belajar. Mutu-mutu tersebut terkait erat dengan biaya pendidikan sebagaimana yang dikatakan John (1983) dalam Fattah (1998:108) yaitu biaya pendidikan dan mutu pendidikan diarahkan pada pencapaian mutu pendidikan yang mengacu pada standar nasional pendidikan yang terdiri dari standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan. Standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan dan standar penilaian pendidikan. Peningkatan mutu mencakup hasil keluaran (output), proses, asupan, masukan (input) (Fattah, 1998: 55).

Berdasarkan pengamatan awal yang penulis lakukan terhadap kepala sekolah dalam melakukan tugas-tugasnya, dalam hal ini penulis melihat, manajemen pembiayaan pendidikan yang dilakukan oleh kepala sekolah SMP Negeri 1 Kota Cirebon berjalan dengan baik, maka seharusnya para pendidik di lingkungan SMP Negeri 1 Kota Cirebon dapat melakukan proses pembelajaran dengan baik, sehingga mutu lulusanpun akan baik pula, tetapi pada kenyataannya masih ada guru yang dalam melakukan kinerjanya sebagai seorang pendidik dan dalam melakukan proses pembelajarannya dinilai masih kurang baik.

Realitas di atas membuat penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul penelitian: *Implementasi Pembiayaan Pendidikan dan Profesionalitas guru terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah di SMP Negeri 1 Kota Cirebon.*

B. Rumusan dan Fokus Masalah

1. Rumusan Masalah

Setelah melakukan penelitian pendahuluan, dan sebagaimana dikemukakan dalam latar belakang masalah, maka ditemukan fenomena yang dipilih sebagai objek perhatian khusus penulis untuk dikaji secara ilmiah dan lebih mendalam.

a. Wilayah penelitian

Wilayah penelitian tesis ini adalah pembiayaan pendidikan yang tentang implementasi pembiayaan pendidikan dan profesionalitas guru dan implementasi pembiayaan terhadap mutu pendidikan di SMP Negeri 1 Kota Cirebon

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan tesis ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif

c. Jenis Masalah

Dengan melihat latar belakang di atas, maka untuk mendapatkan gambaran yang komperatif tentang penelitian ini, dengan demikian dapat ditarik fokus masalah yang dikaji, yaitu bahwa dalam mengimplementasikan manajemen pembiayaan pendidikan ini dari sudut pandang pengelolaan dana pendidikan, bagaimana upaya-upaya yang dilakukan kepala sekolah dalam memenej pembiayaan pendidikan sehingga proses pembelajarann dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya bagaimana profesionalitas guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai tenaga kependidikan dan pendidik, serta bagaimana pengimplementasian manajemen pembiayaan pendidikan dilihat dari kepemimpinan kepala sekolah dalam mengembangkan mutu pendidikan di sekolah tersebut ?

2. Pembatasan Masalah

Pembatasan Masalah ini dibuat untuk memfokuskan masalah penelitian yang akan dikaji dalam tesis ini, sebagaimana berikut :

- a. Pembiayaan yang dimaksud dalam tesis ini adalah pembiayaan yang diterima oleh SMP Negeri 1 Kota Cirebon kemudian dianggarkan dalam RAPBS untuk meningkatkan mutu pembelajaran sehingga mutu pendidikan menjadi baik.
- b. Profesionalitas guru yang dimaksud dalam tesis ini adalah profesionalitas yang dimiliki oleh guru untuk terciptanya proses belajar mengajar yang berkualitas sehingga tujuan tercapai, yakni pendidikan yang bermutu.
- c. Mutu pendidikan adalah keberhasilan yang dicapai siswa kelas IX dalam Ujian Negara (UN) dan keberlanjutan siswa dalam pendidikan.
- d. Penelitian dilakukan di SMP Negeri 1 Kota Cirebon

3. Pertanyaan Penelitian

Tesis ini mengangkat permasalahan tentang Implementasi Pembiayaan Pendidikan dan Profesionalitas guru terhadap peningkatan mutu pendidikan di SMP Negeri 1 Kota Cirebon. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui:

- a. Bagaimana proses pembiayaan pendidikan di SMP Negeri 1 Kota Cirebon dalam meningkatkan mutu pendidikan ?
- b. Bagaimana profesionalitas guru di SMP Negeri 1 Kota Cirebon dalam meningkatkan mutu Pendidikan ?
- c. Seberapa besar implementasi pembiayaan pendidikan dan profesionalitas guru dalam meningkatkan mutu pendidikan di SMP Negeri 1 Kota Cirebon ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menggambarkan mengenai implementasi manajemen pembiayaan pendidikan di SMP Negeri 1 Kota Cirebon
2. Untuk menjelaskan Profesionalitas guru SMP Negeri 1 Kota Cirebon dalam meningkatkan mutu pendidikan

3. Untuk membuktikan implementasi manajemen pembiayaan pendidikan dan profesionalitas guru dalam meningkatkan mutu pendidikan sekolah.

D. Manfaat Penelitian

Selain beberapa tujuan yang disebutkan di atas, dari penelitian ini juga diharapkan dapat membawa manfaat. Adapun manfaat yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat secara teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sarana pembelajaran untuk memahami tentang teori, konsep-konsep dalam manajemen pembiayaan pendidikan, tujuan manajemen pembiayaan pendidikan, dan mempelajari permasalahan serta implementasi manajemen pembiayaan pendidikan.

2. Manfaat secara praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan bermanfaat :

- a. Sebagai bahan masukan bagi lembaga pendidikan (sekolah) dalam meningkatkan manajemen pembelajaran dari temuan-temuan penulis di lapangan
- b. Agar mendorong guru untuk lebih meningkatkan keprofesionalannya dalam menjalankan tugas sebagai pendidik, dan dapat mewujudkan mutu pendidikan sekolah yang lebih baik lagi
- c. Untuk menambah pengetahuan penulis dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang manajemen pembiayaan pendidikan, khususnya dalam pengimplementasian manajemen pembiayaan pendidikan.

E. Pembatasan Istilah

Dalam upaya untuk menghindari kesalahpahaman dalam menangkap isi dari penelitian ini, maka peneliti merasa perlu untuk melakukan pembatasan istilah dan menjelaskan istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, yakni: a.

Manajemen, b. Pembiayaan Pendidikan, c. Profesionalitas, d. Guru, e. Mutu. Kelima istilah tersebut lebih banyak mendominasi gagasan yang dipaparkan dalam penelitian ini.

Manajemen merupakan kegiatan mengelola semua kegiatan dengan merencanakan, melaksanakan dan mengawasinya. Manajemen merupakan usaha yang sistematis dalam mengukur dan menggerakkan orang-orang yang ada di dalam organisasi agar mereka bekerja sepenuh kesanggupan dan kemampuan yang dimilikinya (Abdul Aziz Wahab, 2011: 107).

Pembiayaan Pendidikan menurut Nanang Fattah adalah “biaya pendidikan yang diperoleh dan dibelanjakan oleh sekolah sebagai suatu lembaga. Artinya, biaya-biaya pendidikan yang bersifat budgetair dan non budgetair termasuk dalam pengertian biaya pendidikan dalam arti luas. Sedangkan pengertian biaya pendidikan yang bersifat nonbudgetair yaitu biaya-biaya pendidikan yang dibelanjakan oleh murid, atau orang tua/keluarga dan biaya kesempatan pendidikan” (Nanang Fattah, 2006: 23).

Manajemen Pembiayaan Pendidikan menurut penulis adalah sebuah kegiatan pelaporan atau rancangan tentang penggunaan pembiayaan pendidikan yang dilakukan oleh komite sekolah, dan dijadikan sebagai salah satu penunjang dalam tercapainya tujuan sekolah dengan baik, yaitu berkaitan dengan profesionalitas guru dan mutu pendidikan sekolah.

Profesionalitas adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi (Sudarwan, 2012: 8).

Guru adalah suatu komponen manusia dalam proses belajar mengajar yang ikut berperan dalam usaha pembentukkan sumber daya manusia yang potensial di bidang pembangunan. Guru secara langsung merupakan kunci dalam peningkatan mutu pendidikan dan mereka berada pada titik sentral dari setiap usaha reformasi pendidikan yang diarahkan pada perubahan-perubahan kualitatif. Sehingga setiap usaha peningkatan mutu pendidikan seperti pembaharuan kurikulum, pengembangan metode-metode mengajar, penyediaan sarana dan prasarana hanya akan berarti apabila melibatkan guru (Jalal dan Dedi, 2001: 262).

Profesionalitas guru menurut penulis profesionalitas guru adalah suatu bentuk kinerja yang dilakukan oleh guru yang berkompeten baik dalam proses pembelajaran maupun dalam pengembangan keilmuannya yang akan diasumsikan kepada peserta didik. Sehingga proses pembelajaran akan berjalan dengan baik dan keberhasilannya akan sesuai dengan apa yang diharapkan.

Mutu Pendidikan adalah suatu ketercapaian dari hasil belajar dan pengelolaan sekolah. Suatu sekolah dinyatakan bermutu pendidikan yang baik, apabila mutu lulusannya cepat terserap dalam dunia kerja maupun lembaga-lembaga yang membutuhkan lulusan tersebut dan stakeholder merasa puas terhadap lulusan tersebut.

Mutu Pendidikan Sekolah menurut penulis adalah suatu lembaga pendidikan dipandang bermutu lulusannya, apabila lulusan siap berproses dan bersaing sesuai dengan kemampuan, kreativitas yang dimiliki.

F. Kerangka Pemikiran

Peran anggaran dalam pengelolaan pembelajaran yang berkaitan dengan layanan belajar dan manajemen sekolah secara keseluruhan tentu sangatlah penting untuk mencapai tujuan. Anggaran merupakan rencana kuantitatif terhadap operasi

organisasi sekolah, dalam perencanaan anggaran mengidentifikasi sumber dana dan komitmen yang dibutuhkan untuk memenuhi tujuan organisasi selama periode anggaran. Anggaran meliputi aspek keuangan ataupun aspek non keuangan dari operasi yang direncanakan. Anggaran pada suatu periode merupakan pedoman untuk melakukan operasi selama periode anggaran dan merupakan pedoman untuk melakukan operasi yang mungkin dapat dicapai. Proses penyiapan anggaran disebut dengan penganggaran yaitu menyediakan anggaran merupakan dua hal yang saling berkaitan dengan semua aspek manajemen. Karena anggaran merupakan suatu instrument yang dirancang untuk memfasilitasi perencanaan, anggaran juga memberikan sebuah konteks proses perencanaan dalam memilih langkah-langkah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan (Mintarsih, 2004: 36).

Manajemen pembiayaan berkaitan dengan pencatatan pendapatan dan pengeluaran yang sesuai dengan aturan main, aktif menggali dana dan menyalurkan sesuai prosedur, serta dilengkapi dengan laporan rutin mingguan, bulanan, tengah semester, satu semester dan tahunan. Evaluasi terus menerus harus dilakukan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas aspek keuangan ini. Evaluasi ini juga penting dalam rangka perbaikan manajemen sehingga tak ada celah sedikitpun untuk melakukan penyimpangan keuangan.

Pentingnya melakukan analisis kebutuhan pembiayaan ini dilandasi oleh pemikiran bahwa biaya yang ideal sesuai dengan standar kebutuhan akan menghasilkan output yang berkualitas yaitu kemampuan bersaing dalam era globalisasi. Kemampuan menggalang kerjasama dengan yang lain dan juga punya daya tahan, yang tentu saja semua ini bisa diperoleh apabila biaya yang tersedia berdasarkan kebutuhan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran-sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya. Ingemar dan Saha menyatakan pendidikan tidak

boleh diartikan sebagai “konsumsi” tetapi pendidikan harus diartikan sebagai “investasi” yang produktif. Jika pendidikan diartikan sebagai konsumsi, maka targetnya adalah selesai mengikuti pendidikan seadanya yang penting memperoleh ijazah, atau telah memadai. Jika pendidikan dianggap sebagai investasi, maka diperlukan strategi untuk memperoleh mutu.

Pendidikan tidak hanya mempersiapkan individu dalam membentuk kepribadian, tetapi pendidikan menyediakan berbagai macam tenaga kerja yang sangat penting mendukung pembangunan industri dan pertumbuhan ekonomi. Pendidikan membutuhkan pengeluaran yang tidak sedikit dari keuangan agar memberi kontribusi berupa pertumbuhan ekonomi masyarakat dan pembangunan bangsa, sedangkan bagi individu akan meningkatkan kemampuan ekonomis dan kecerdasan individu. Biaya (cost) diartikan sebagai suatu jumlah uang yang disediakan (dialokasikan) dan digunakan atau dibelanjakan untuk terlaksananya fungsi-fungsi atau kegiatan pencapaian tujuan dan sasaran-sasaran dalam rangka proses manajemen sekolah.

Mujamil Qomar (dalam M. Sobry Sutikno, 2012: 69) menjelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh manajer lembaga pendidikan dalam konteks keuangan, yaitu :

1. Anggaran harus benar-benar digunakan sesuai dengan program yang direncanakan.
2. Efisiensi anggaran adalah keniscayaan untuk menghindari adanya kecurangan pengadaan barang
3. Harus dibuang jauh-jauh kesan bahwa penggunaan uang hanya untuk menghabiskan dana karena penghematan adalah unsur penting dari manajemen pembiayaan

4. Yang berhak mengeluarkan uang adalah petugas yang berwenang sesuai dengan aturan yang berlaku (Jamal Ma,mur Asmani, 2013: 94).

Guru merupakan orang yang berada “digaris depan” atau bahkan sebagai ujung tombak pada proses pendidikan. Hal tersebut disebabkan guru berposisi sebagai perancang, pelaksana, dan pengevaluasi pembelajaran sehingga tidak berlebihan apabila dikatakan guru merupakan salah seorang yang bertanggungjawab dalam mensukseskan program pembelajaran di sekolah. Kondisi tersebut menginsyaratkan bahwa hasil pembelajaran secara keseluruhan ditentukan oleh berbagai macam faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran. Akan tetapi, faktor guru memegang peranan yang sangat penting dalam pencapaian tujuan pembelajaran.

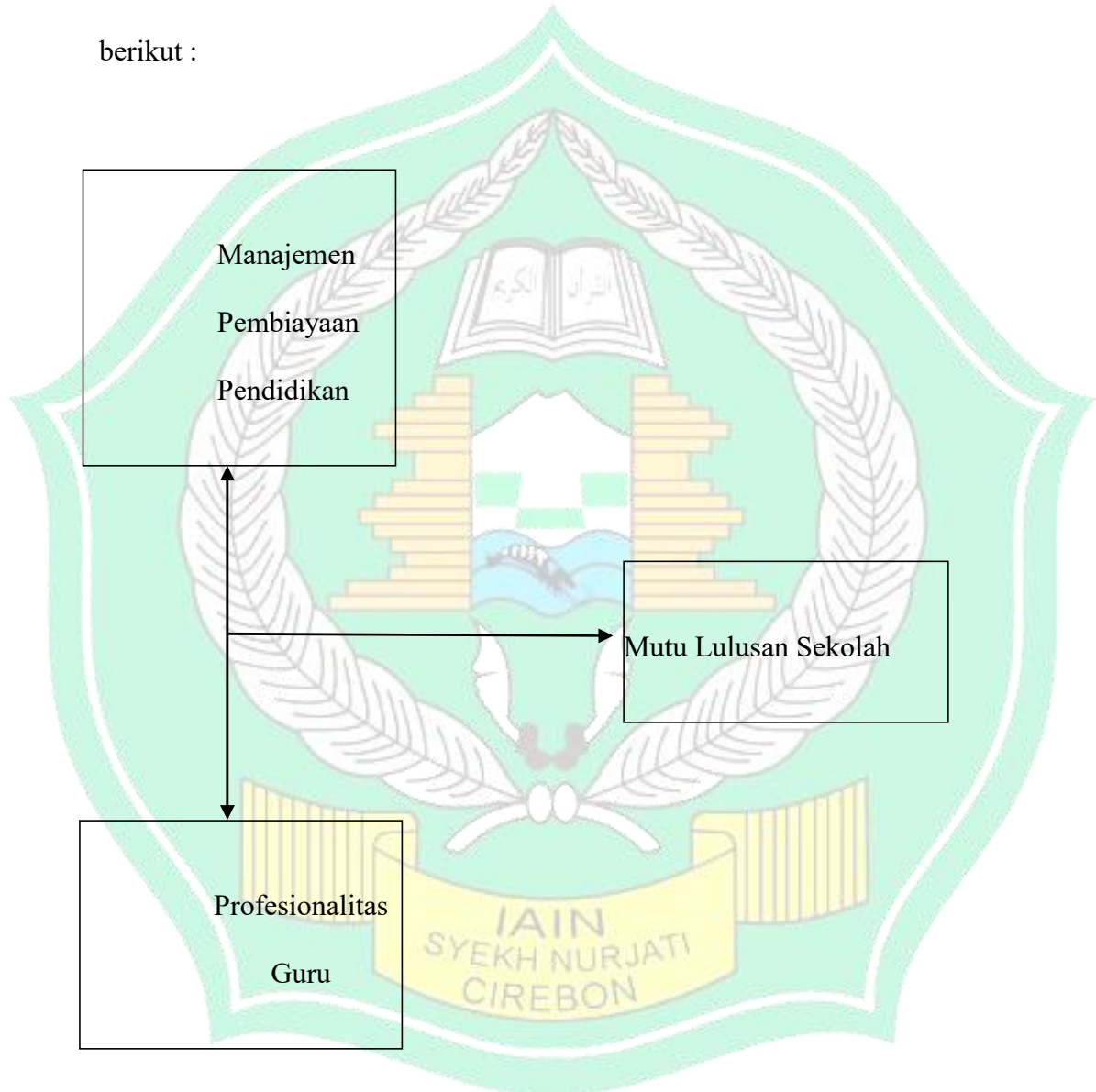
Pendidikan akan berhasil dengan baik apabila dilakukan oleh guru yang profesional dan bertanggungjawab dalam proses pembelajaran. Sekolah dapat berjalan tanpa gedung dan sarana fisik lainnya, tetapi tidak unguin berjalan tanpa hadirnya seorang guru. Guru merupakan kunci keberhasilan dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Secara tegas dapat dikatakan bahwa tidak ada pembaharuan tanpa melalui pendidikan, guru sebagai pelapor dan pelaksana pembaharuan, sekolah bertugas melaksanakan perubahan tersebut melalui kegiatan mendidik, mengajar, dan melatih peserta didik.

Melalui kegiatan manajemen keuangan maka kebutuhan pendanaan kegiatan sekolah dapat direncanakan, diupayakan pengadaannya, dibukukan secara transparan, dan digunakan untuk membiayai pelaksanaan program sekolah secara efektif dan efisien.

Untuk itu tujuan manajemen keuangan sekolah menurut Suryana (2008: 56) adalah :

1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan sekolah
2. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan sekolah
3. Meminimalkan penyalahgunaan anggaran sekolah

Secara singkat, kerangka pemikiran dalam penelitian tentang implementasi manajemen pembiayaan pendidikan dan profesionalitas guru serta kaitannya dengan mutu pendidikan di SMP Negeri 1 Kota Cirebon. Digambarkan sebagai berikut :



Jika manajemen pembiayaan pendidikan dan profesionalitas guru di Sekolah berjalan dengan baik, maka mutu lulusan sekolah yang dihasilkan akan baik pula.

Jika manajemen pembiayaan pendidikan dan profesionalitas guru kurang baik, maka mutu lulusan sekolah yang dihasilkannya akan kurang baik pula.

G. Tinjauan Pustaka

Penulis berusaha melakukan kajian-kajian terhadap tulisan-tulisan para peneliti yang pernah melakukan penelitian di bidang dan ruang lingkup yang memiliki meanstrim tentang : Implementasi Manajemen Pembiayaan Pendidikan dan Profesionalitas Guru dalam meningkatkan mutu pendidikan di SMP Negeri 1 Kota Cirebon.

Berdasarkan pengamatan dan studi awal penulis, ternyata kajian tentang: *Implementasi Manajemen Pembiayaan Pendidikan dan Profesionalitas Guru dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di SMP Negeri 1 Kota Cirebon* belum dilakukan oleh para penelitian lain. Namun demikian, telah ada beberapa penelitian yang memiliki kemiripan dengan penelitian penulis, diantaranya adalah :

Sugiro. *Efektivitas Manajemen Pendidikan dan Profesionalitas Guru Dalam Meningkatkan Prestasi Akademik Siswa di SMA NU Kaplongan Kabupaten Indramayu*. Tesis ini ditulis pada tahun 2012 membahas tentang Peranan kepala sekolah dan profesionalitas guru tetapi tidak membahas tentang mutu lulusan sekolah.

Wawat Rohmawati. *Efektivitas Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Meningkatkan Kemampuan Profesionalitas Dan Kinerja Guru di MAN Rajagaluh Kabupaten Majalengka*. Tesis ini ditulis pada tahun 2012 membahas tentang Manajemen pengembangan sumber daya manusia dan profesionalitas guru, namun tidak membahas tentang Manajemen Pembiayaan Pendidikan.

Busro Arifin. *Pengaruh Profesionalitas Kepala Sekolah Dan Kinerja Guru Terhadap Prestasi Belajar Siswa di Madrasah Aliyah (MAN) Karangampel Kabupaten Indramayu*. Tesis ini ditulis pada tahun 2011 membahas tentang Profesionalisme kepala sekolah dan kinerja guru, tetapi tidak membahas mutu pendidikan sekolah.

Penelitian lain yang hampir sama adalah penelitian yang dilakukan oleh Junaidin Nobisa, yakni dengan judul tesis : *Peran Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Pengembangan Mutu Pendidikan di MTs Se-Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan*. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2010. Penelitian ini membahas tentang peran kepala sekolah yang berupaya mengembangkan mutu pendidikan, tetapi tidak membahas profesionalitas guru.

Berdasarkan realitas di atas, penulis belum menemukan penelitian yang membahas tentang : *Implementasi Manajemen Pembiayaan Pendidikan dan Profesionalitas Guru dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di SMP Negeri 1 Kota Cirebon*. Dengan demikian, penulis menganggap bahwa penelitian dengan judul di atas layak untuk diteliti.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulis dalam penelitian ini, secara urut mencakup lima bab, yang dijabarkan dalam garis besarnya sebagai berikut :

Bab satu, pendahuluan : yang di dalamnya mencakup beberapa sub pembahasan yaitu, tentang latar belakang masalah, perumusan masalah dan fokus masalah, pembatasan istilah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, dan sistematika penulisan.

Bab dua, membahas tinjauan teoritis mengenai implementasi manajemen pembiayaan pendidikan, mencakup : pengertian manajemen pembiayaan, tujuan

manajemen pembiayaan sekolah, prinsip-prinsip manajemen pembiayaan sekolah, implementasi manajemen pembiayaan pendidikan, sumber keuangan sekolah. Tinjauan profesionalitas guru mencakup : pengertian profesionalitas guru, prinsip-prinsip kinerja pendidik, fungsi guru sebagai pendidik, faktor-faktor yang mempengaruhi profesionalitas guru. Tinjauan tentang mutu pendidikan mencakup : pengertian mutu pendidikan, indikator-indikator mutu pendidikan sekolah, faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan mutu pendidikan sekolah.

Bab ketiga, membahas metodologi penelitian, yang di dalamnya mencakup lokasi penelitian, pendekatan penelitian, metode penelitian, sumber data (observasi partisipan dan wawancara mendalam), instrument penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab keempat, membahas tentang deskripsi data dan pembahasan hasil penelitian, yang di dalamnya mencakup deskripsi dan hasil penelitian, yang di dalamnya mencakup implementasi manajemen pembiayaan pendidikan, upaya kepala sekolah dalam meningkatkan profesionalitas guru dan manajemen pembiayaan pendidikan kaitannya dalam meningkatkan mutu pendidikan.

Bab kelima, merupakan bab terakhir. Pada bagian ini berisi kesimpulan serta intisari dari lapangan. Kesimpulan ini merupakan jawaban dari fokus masalah penelitian. Dari kesimpulan ini akan diperoleh gambaran pemikiran penulis dalam upaya peningkatan profesionalitas guru dalam meningkatkan mutu pendidikan.